

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM PENGAMANAN
UNJUK RASA ANARKIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA**

TESIS

Oleh:

ARDIAN

202120251026



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN DALAM PENGAMANAN
UNJUK RASA DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Nama Mahasiswa : ARDIAN

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251026

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Fakultas Hukum

Program Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, April 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. DWI ATMOKO, S.H., M.H.
NIDN. 0316077604


Dr. LUKMAN HAKIM, S.H., M.H.
NIDN. 0316077606

LEMBAR PENGESAHAN

Judul tesis : Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Anarkis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Nama Mahasiswa : Ardian

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251026

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Program Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 23 Mei 2023

Jakarta, Mei 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H.
NIDN. 0324015802

Penguji I : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIDN. 0319046403

Penguji II : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
NIDN. 0316077604

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dr. LUSIA SULASTRI, S.H., M.H
NIDN. 0127117401

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. SLAMET PRIBADI, S.H., M.Hum
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardian

NPM : 202120251026

TTL : Jakarta, 28 Januari 1992

Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Anarkis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Agabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 23 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



ARDIAN

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardian

NPM : 202120251026

TTL : Jakarta, 28 Januari 1992

Prodi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM PENGAMANAN UNJUK RASA ANARKIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA"**.

Berserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Mei 2023

pernyataan

ARDIAN

ABSTRAK

Ardian. 202120251026, Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Anarkis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang, untuk mengeluarkan pendapat atau untuk melakukan pertentangan terhadap suatu kebijakan yang dianggap tidak sesuai dan melanggar aturan hukum kerap sekali menimbulkan kericuhan. Rumusan masalah dalam tesis ini, mengenai penegakan hukum terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran dalam pengamanan unjuk rasa yang anarkis dan hambatan dan upaya anggota polisi yang melakukan pelanggaran dalam pengamanan unjuk rasa yang anarkis. Tesis ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepuustakaan) dengan analisis secara kualitatif terhadap data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang penegakan hukum terhadap anggota Polisi yang melakukan pelanggaran dalam pengamanan unjuk rasa yang anarkis dengan aturan tanggung jawab dan sanksi atau tindakan yang dapat dikenakan kepada Polri sebagaimana aturan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia. Hambatan anggota Polisi dalam pengamanan unjuk rasa yang anarkis berakhir melakukan pelanggaran yaitu kemampuan pengendalian massa oleh aparat Kepolisian belum efektif dan jumlah aparat Kepolisian yang kurang. Terhadap hambatan ini, dilakukan upaya berupa memaksimalkan mental Anggota Kepolisian dalam pengendalian unjuk rasa dan memahami peraturan perundang-undangan serta peran Divisi Propam dalam menerima dan melakukan penanganan terkait keluhan dari adanya dugaan pelanggaran saat Unjuk Rasa.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Polisi, Unjuk Rasa

ABSTRACT

Ardian. 202120251026, *Law Enforcement Against Police Members Who Commit Violations In Securing An Anarchist Demonstrations From Law Number 2 Year 2002 Concerning The Police Of The Republic Of Indonesia.*

Demonstrations or demonstrations are an activity carried out by a person or group of people, to express opinions or to oppose a policy that is considered inappropriate and violates the rule of law, often causing chaos. The formulation of the problem in this thesis concerns law enforcement against police officers who commit violations in securing an anarchic demonstrations and the obstacles and efforts of police officers who commit violations in securing an anarchic demonstrations. This thesis uses normative legal research methods (library) with qualitative analysis of secondary data to obtain conclusions about law enforcement against members of the police who commit violations in securing an anarchic demonstration with rules of responsibility and sanctions or actions that can be imposed on the police as the rules in the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia and the Law on the Police of the Republic of Indonesia. Obstacles by members of the Police in securing anarchic demonstrations ended in committing violations, namely the ability to control crowds by the Police apparatus was not yet effective and the number of Police officers was insufficient. Against this obstacle, efforts were made in the form of maximizing the mentality of Police Members in controlling demonstrations and understanding laws and regulations as well as the role of the Propam Division in receiving and handling complaints related to alleged violations during demonstrations.

Keywords: *Law Enforcement, Police, Protests*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT penulis ucapkan atas segala kemudahan yang diberikan kepada penulis, karena berkat limpahan rahmat dan kemudahannya yang luar biasa sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (tesis) ini dengan lancar dan baik. Tesis ini berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM PENGAMANAN UNJUK RASA ANARKIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA”.

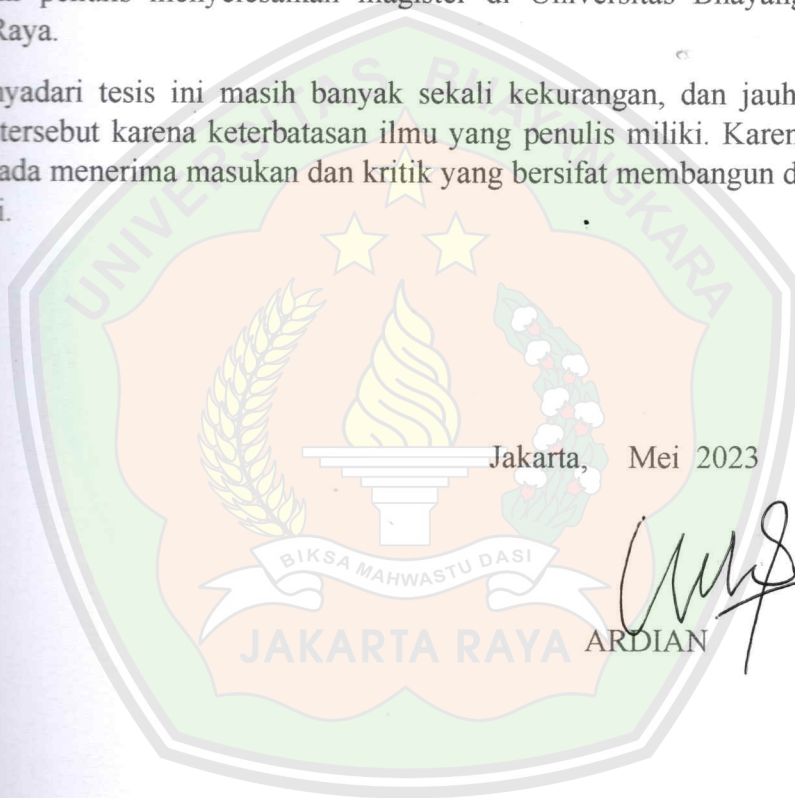
Penulis mengambil tema tesis ini berdasarkan pemikiran bahwa apa yang penulis tulis berdasarkan pada realita pekerjaan yang penulis lakukan. Tesis yang bertema tentang Hukum Pidana. Penulisan tesis ini berjalan baik berkat banyak bantuan yang diterima penulis dalam proses penyusunannya. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bapak Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H, M.M.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Ibu Dr. Lusia Sulastri, SH., M.H.
4. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bapak Dr. Sugeng, S.H., M.H.
5. Pembimbing I, Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH., MH. dosen dan pembimbing yang sangat luar biasa. Berkat ilmu dan kesabarannya membimbing, membuat penulis bersemangat untuk terus belajar, semoga kelak penulis dapat menjadi sehebat seperti beliau. Aamiin yaarobbal alamiin.
6. Pembimbing II, Bapak Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H., yang sangat baik memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis.
7. Para Penguji sidang tesis, Ibu Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H. dan Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H. Terima kasih atas masukan dan motivasi yang disampaikan, untuk menjadi perbaikan kedepannya.
8. Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, atas ilmu yang

telah diberikan kepada Penulis, sehingga penulis berhasil melangkah sampai tahap ini.

9. Bapak/Ibu di Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, atas bantuannya selama Penulis menjadi mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Pihak Orang Tua, Abang, Kakak Ipar, Istri dan Saudara sepupu yang juga terus memberikan semangat untuk menyelesaikan Tugas akhir (Tesis).
11. Teman seangkatan dari Kelas Jakarta dan Bekasi yang berjuang bersama menemani penulis menyelesaikan magister di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari tesis ini masih banyak sekali kekurangan, dan jauh dari kesempurnaan, hal tersebut karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karenanya Penulis berharap dada menerima masukan dan kritik yang bersifat membangun dalam perbaikan tulisan ini.



Jakarta, Mei 2023


ARDIAN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Identifikasi Masalah	6
1.3.Rumusan Masalah.....	7
1.4.Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	7
1.5.Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran.....	8
1.5.1. Kerangka Teori.....	8
1.5.2. Kerangka Konseptual	12
1.5.3. Kerangka Pemikiran	14
1.6.Metode Penelitian	15
1.7.Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.Kepolisian Republik Indonesia.....	19
2.1.1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia	19
2.1.2. Tugas Kepolisian Republik Indonesia.....	20
2.1.3. Wewenang Kepolisian Republik Indonesia	22
2.2.Kebebasan Berpendapat di Muka Umum.....	23
2.2.1. Pengertian Kebebasan Berpendapat	
di Muka Umum.....	23
2.2.2. Asas dan Tujuan Menyampaikan Pendapat	
di Muka Umum.....	26
2.2.3. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam	

	Menyampaikan Pendapat di Muka Umum	27
2.2.4.	Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan Tata Cara Pelaksanaannya	29
2.3.	Pengertian Demonstrasi dan Bentuk-bentuk	
	Demonstrasi	33
2.3.1.	Pengertian Demonstrasi	33
2.3.2.	Bentuk-bentuk Demonstrasi	35
2.4.	Tindak Pidana	37
2.4.1.	Pengertian dan Unsur Tindak Pidana	37
2.4.2.	Kejahatan dan Pelanggaran	40
BAB III	PENEGAKAN HUKUM ANGGOTA KEPOLISIAN MELAKUKAN PELANGGARAN SAAT PENGAMANAN UNJUK RASA	
3.1.	Pengaturan Tindakan Anggota Kepolisian Dalam Menghadapi Unjuk Rasa	48
3.2.	Faktor Penyebab Anggota Kepolisian Melakukan Pelanggaran Pengamanan Unjuk Rasa	70
BAB IV	HAMBATAN DAN UPAYA DALAM PENGAMANAN UNJUK RASA TIDAK TERJADI PELANGGARAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN	
4.1.	Proses Penanganan Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Dalam Aksi Unjuk Rasa Anarkis Yang Berdampak Pada Kerusakan Fasilitas Umum	76
4.2.	Hambatan dan Upaya Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Agar Tidak Terjadi Pelanggaran Oleh Anggota Kepolisian	93
BAB V	PENUTUP	
5.1.	Simpulan	122
5.2.	Saran	123
DAFTAR PUSTAKA		124